

Hardi Supeno & Noviansyah Rizal

PENGARUH PARTISIPASI MANAJEMEN TERHADAP KEPATUHAN, KEBENARAN LAPORAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS MELALUI AKUNTANSI INSTANSI (Studi Pada Instansi PT X dan Lembaga/unit pemerintah wilayah Jawa Timur)

Oleh :

Hardi Supeno & Noviansyah Rizal *)

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 45, Surabaya &

*) Dosen STIE WIDYAGAMA Lumajang

Abstract

Recently, government intends to build a well-organized management in all governmental divisions. Financial management given to all of them must reflect the well-organized and accountable management. To gain this government need to respond to the program application of institutional accounting system as a means to exhibits financial transparency and responsibility toward society. The role of management is very important in its implementation; that is to maintain report accuracy, which is responsive, communicative, accountable, and transparent, which will create a good governmental management.

Key words : *institutional accounting system, report accuracy, transparency, accountable*

PENDAHULUAN

Kuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Asas-asas pengelolaan keuangan negara :

1. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan

Kuangan Negara

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk merealisasikan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian sistem akuntansi instansi (SAI) sangat penting dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance (accounting for governance)*.

Pengertian *good governance* (tata kelola yang baik) bagi instansi pemerintah adalah : berkepentingan pada masyarakat

sebagai konsumen yang dilayani, pemerintah yang bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintahan yang produktif, efektif, efisien, memberikan kenyamanan fasilitas pelayanan publik.

Good governance secara dasar memberikan arti : penyelenggaraan pemerintah yang baik yang mengandung substansi nilai : bagaimana organisasi pemerintah melaksanakan aktivitas pemerintahannya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendidik masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri dalam berhubungan dengan organisasi pemerintah, dimana masyarakat mengerti secara benar aturan pemerintah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada organisasi pemerintah dan karena ada kepastian jaminan hukum .

Setiap unit pemerintah yang berkembang harus memiliki sistem informasi yang efektif dan akurat. Kebutuhan sistem informasi yang didukung oleh pengembangan sistem informasi terpadu dan sesuai dengan kebutuhan unit pemerintah. Pemerintah telah menyusun sistem akuntansi instansi sejak tahun 2003 dan selalu dilakukan penyempurnaan dan pengembangan yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan instansi pemerintah.

Pemerintah sejak tahun 2003 telah menyusun manual akuntansi instansi dan aplikasi program komputer yang harus dipakai oleh unit pemerintah. Sistem akuntansi Instansi (SAI) dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu : Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Manajemen-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.

Aplikasi program untuk SAK digunakan untuk pelaporan sisi keuangan (belanja) dari pemerintah, membuat laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran Belanja), sedangkan aplikasi program SIMAK-BMN dipakai membuat laporan Barang (Aset tetap pemerintah) dan aplikasi program persediaan. Program ini cukup membantu untuk menyediakan informasi secara langsung dan dapat memberikan informasi yang mencukupi untuk memberikan dasar pengambilan keputusan pimpinan. Laporan keuangan pemerintah

Kebutuhan atas laporan keuangan :

1. Informasi keuangan merupakan suatu kebutuhan bagi para pengguna (stakeholders);
2. Laporan keuangan disajikan kepada stakeholder untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil lebih berkualitas dan tepat sasaran;
3. Laporan keuangan merupakan cermin untuk melihat kondisi keuangan instansi pemerintah;
4. Neraca merupakan cermin utama untuk melihat apa yang ada di instansi

pemerintah, terutama menyangkut hal-hal yang salah urus atau hal-hal yang tidak diurus maupun yang belum diurus;

Laporan keuangan untuk transparansi :

1. Era keterbukaan, teknologi informasi & komunikasi sedemikian maju, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dengan biaya relatif murah.
2. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan operasional instansi pemerintahan;
3. Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat semakin cerdas menuntut adanya transparansi.
4. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif.

Laporan keuangan untuk akuntabilitas :

1. Laporan keuangan merupakan gambaran adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan.
2. Akuntabilitas adalah “amanah” berarti pemangku kekuasaan adalah mereka yang dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumberdaya publik yang diberikan kepadanya;
3. Tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas;
4. Lemahnya akuntabilitas mengindikasikan lemahnya sistem, selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistematis;

Hak, wewenang, dan kewajiban unit pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan , urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan pemerintah pusat , pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) yang menanganinya,

merupakan bagian dari transparansi pengelolaan sumber daya pemerintah.

Dana yang diserahkan tersebut dapat untuk dimanfaatkan sebagai sumber keuangan untuk mendanai belanja pemerintah terhadap alokasi yang telah direalisasikan. Implikasi langsung pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur penggunaan keuangan Pusat dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI), merupakan langkah pemerintah dalam membangun sistem aplikasi pengelolaan dana yang ada di instansi pemerintah, guna mendukung tercapainya pengelolaan dana yang efektif, efisien.

Tetapi pada pelaksanaannya SAI masih memiliki beberapa kelemahan, akibat sistem tersebut masih berbentuk sistem baku yang memerlukan beberapa penyesuaian akibat berbeda dengan sistem operasional yang digunakan oleh beberapa instansi.

Sistem SAI dibuat dengan partisipasi antar pengguna sistem dimana kelemahan-kelemahan diperbaiki. dan prosedur yang tidak sesuai, disesuaikan dengan kondisi yang ada ditempat unit pemerintah yang bersangkutan, dengan ikut berpartisipasi pemakai sistem SAI dalam pengembangan sistem akuntansi instansi diharapkan pemakai sistem dapat bekerja lebih baik dan lebih mudah penggunaannya.

Untuk merealisasikan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut , pengembangan dan pengaplikasian akuntansi instansi sangat

penting sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance* (*accounting for governance*).

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara sekaligus diharapkan untuk meraih dua tujuan mengurangi potensi konflik, meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyat, meningkatkan peringkat SUN, pencegahan tindakan korupsi (Nasution, Anwar, 1, 2, 2009)

Penyusunan APBN berbasis prestasi kerja atau kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan *value added* bagi pemerintah. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat.

Pemerintah yang responsif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dalam mewujudkan *good governance* (Mardiasmo, 1, 2006). Bank Dunia memberikan definisi *governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih memfokuskan pada cara pengelolaan negara dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan; aspek ekonomi yang mengacu pada proses pembuatan keputusan yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup; dan yang terakhir aspek administratif yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Dengan demikian, orientasi pembangunan sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. Lebih jauh, UNDP memberikan beberapa

karakteristik pelaksanaan *good governance*, antara lain *transparency*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *efficiency* dan *effectiveness*, serta *accountability*. Dari karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, *value for money*, dan akuntabilitas.

Beberapa Kelemahan

Pada pelaksanaannya SAI masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam implikasi terhadap aplikasi program SAI diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia, kelemahan yang di sumber daya manusia terdapat beberapa hal yang menjadi kendalanya (a). Tingkat pendidikan pemegang aplikasi program bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi (manajemen, akuntansi) (b). Tingkat pemahaman petugas aplikasi program SAI terhadap setiap transaksi keuangan yang terjadi (c) Rotasi dan mutasi yang tidak mempertimbangkan kaderisasi operator aplikasi (d). Promosi suatu jabatan yang tidak dibarengi dengan kaderisasi operator (e). Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani aplikasi program SAI.
2. Pemasukkan aplikasi program terutama untuk aplikasi SIMAK-BMN antara pencatatan pada pembukuan didasarkan pada saat pencairan dana (Surat perintah pencairan dana atau SP2D) dapat dicairkan, tetapi pada prinsip akuntansi (SAK, 2008, IAI) pencatatan aset tetap berdasarkan harga kwitansi belanja (harga perolehan), dimana antara harga perolehan aset dengan pencairan SP2D ada tenggang waktu, tetapi yang dipakai dalam aplikasi program adalah tanggal SP2D.
3. Akibat dari poin 2 di atas akan juga memperlemah penetapan penyusutan yang akan dilaksanakan terhadap aset

tetap pemerintah.

4. Pemahaman akan pentingnya aplikasi program SAI terhadap akuntabilitas pemerintah oleh atasan langsung operator SAI, masih belum rendah.
5. Belum dilakukan penempatan yang baik terhadap pengelola aplikasi program SAI terutama pengelola aset tetap dan persediaan.
6. Belum optimalnya koordinasi tingkat departemen/unit kerja mengenai keterkaitan antara anggaran, belanja, dan pelaporan; sehingga selalu terjadi kesalahan-kesalahan dalam aktivitas yang telah ditetapkan di anggaran, dan waktu pembelanjaan sehingga menyulitkan dalam pelaporan.

Partisipasi Manajemen

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang tidak memadai karena permasalahan di atas., terutama ketersediaan tenaga akuntansi, terlebih lagi yang memahami Sistem Akuntansi Instansi.

Hasil penelitian BPK pada enam kementerian negara/lembaga, 20 pemerintah daerah serta 12 perguruan tinggi untuk memperoleh gambaran umum kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia pemerintah dalam mengimplementasikan paket tiga UU keuangan negara dengan hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi berikut (1) kekurangan sumber daya manusia yang mengelola keuangan negara, khususnya yang berlatar belakang akuntansi; (2) penempatan sumber daya manusia yang keliru; (3) tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih lemah; (4) *reward system* yang belum tepat; dan (5) sarana dan prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan

akuntansi sektor publik masih membutuhkan perbaikan mutu.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pengelola administrasi di pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola system akuntansi instansi. Untuk memperbaiki tatakelola harus dijalankan melalui reformasi birokrasi dimana perbaikan sumber daya manusia menduduki peranan sentral untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas layanan publik. Untuk dapat menjalankan program perbaikan tatakelola keuangan negara melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terlebih dulu perlu dikaji kondisi sumber daya manusia yang ada.

Beberapa pertanyaan perlu dijawab terlebih dahulu antara lain:

- (1). seberapa memadai jumlah sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi (akuntansi sektor publik) untuk memenuhi kebutuhan penyusunan laporan keuangan, baik pelaksana teknis atau para pengambil keputusan ditingkat manajemen menengah.
- (2). seberapa kompeten sumber daya manusia yang ada untuk memahami sistem akuntansi instansi di unit kerja yang bersangkutan baik pelaksana maupun pengambil kebijaksanaan (*middle management*) yang berpartisipasi aktif dan sangat mendukung keberadaan aplikasi program sistem akuntansi instansi.
- (3). seberapa tepat penempatan mereka untuk pelaksana teknis sistem akuntansi instansi oleh manajemen unit kerja yang bersangkutan.
- (4). seberapa tinggi manajemen berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan atau implementasi sistem akuntansi instansi di unit kerjanya.

Dalam situasi seperti ini, tugas

manajemen mengidentifikasi, mengevaluasi, mencari solusi atas semua masalah transisional ini. Yang dihadapi manajemen pada situasi dan kondisi seperti ini adalah berbagai paradoks. Puncak manajemen menginginkan manajemen menengah kebawah menjadi pemimpin yang kuat yang mampu menyelesaikan masalah, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan.

Pelaksana teknis ingin manajemen yang menyatu dengan pelaksana teknis, tetapi juga bisa mengambil tindakan-tindakan visioner yang dijabarkan kedalam rincian kerja yang dapat memenuhi tujuan dengan transparansi yang tinggi. Manajemen harus dapat mengatasi semua perbedaan-perbedaan yang muncul dari bawah untuk tetap menjaga komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak boleh ada masalah dikemudian hari.

Pelaksana teknis menginginkan manajemen yang baik, sebagai fasilitator, moderator, eksekutor, tetapi tiap keputusan harus selalu bisa menenangkan satu pihak dan pihak lain. Pelaksana teknis menginginkan manajemen yang punya program jelas dan sistematis, tetapi juga tanggap pada suara-suara pelaksana teknis yang selama ini belum terpenuhi.

Dalam program sistem akuntansi instansi memang tidak menarik untuk dipelajari maupun untuk ditekuni apalagi dipakai manajemen dalam meniti karir pekerjaan, hal ini disebabkan terdapat ketidak jelasan penghargaan atau hukuman apabila tidak melaksanakan sistem akuntansi instansi secara baik, dan benar, serta dimana merubah mental lama menjadi mental baru yang profesional untuk saat sekarang perlu kesabaran dan pemahaman pada seluruh karakter pegawai.

Dukungan partisipasi manajemen puncak dan komunikasi yang memperkuat pengaruh hasil pelaksanaan atau implementasi aplikasi program sistem akuntansi instansi

dan hasil laporan keuangan pemerintah sangat penting sekali. Disamping partisipasi manajemen puncak yang sangat penting sekali adalah partisipasi dan dukungan dari manajemen menengah yang membawahi bagian atau departemen yang membidangi sistem akuntansi instansi.

Dalam kenyataan dilapangan ada beberapa manajemen unit kerja yang membawahi aplikasi program sistem akuntansi instansi tidak mempunyai kompetensi terhadap pengelolaan sistem akuntansi instansi dan tidak mendukung secara optimal terhadap kinerja pelaksana teknis sistem akuntansi instansi.

Overlapping tugas, kekurangan personil, tidak mendapat pelatihan sesuai tugas, penghargaan terhadap peserta pelatihan, tanggung jawab tidak sesuai keahlian dilapangan dirasakan pelaksana teknis sistem akuntansi instansi.

Pelatihan yang dilaksanakan Departemen Keuangan yaitu PPAK guna menopang kekurangan sumber daya manusia yang kompetensinya mempunyai pengetahuan bidang akuntansi; dan dengan tujuan memberikan reward terhadap pelaksana teknis yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan tersebut, sampai saat ini belum ada realisasinya, sehingga pelaksana teknis ini semakin menjadi tidak berfokus pada tugas yang dibebankan unit kerjanya (aplikasi program sistem akuntansi instansi) dan semakin menurun motivasi mereka terhadap pekerjaan yang dibebankan.

Umumnya, pelaksanaan evaluasi atas kegiatan atau program suatu instansi pemerintah merupakan tugas para pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu. Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan (*monitoring*) dan pengendalian. (Menpan, 1, 2005).

Terkadang fungsi monitoring dan fungsi evaluasi, sulit untuk dipisahkan.

Penyusunan sistem dalam organisasi dan pembagian tugas, fungsi serta pembagian peran pihak-pihak dalam organisasi, adakalanya tidak perlu dipisah-pisah secara nyata. Fungsi manajemen puncak misalnya, meliputi semua fungsi dari perencanaan sampai pengendalian. Oleh karena itu, evaluasi sering dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam suatu rapat kerja, rapat pimpinan, atau temu muka, baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian-kejadian khusus lainnya.

Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Di samping untuk melengkapi berbagai fungsi di dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Organisasi yang gagal mengidentifikasi kesalahan yang sama yang dilakukan secara terus menerus, tidak akan tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang unggul.

Jadi secara umum, manajemen perlu melakukan evaluasi, evaluasi harus dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) karena evaluasi merupakan fungsi manajemen;
- 2) karena evaluasi merupakan mekanisme umpan balik bagi perbaikan untuk manajemen.
- 3) karena evaluasi akan dapat menghindarkan organisasi dari mengulangi kesalahan yang sama oleh manajemen pelaksana teknis;
- 4) karena evaluasi akan dapat menemukan dan mengenali berbagai masalah yang ada di dalam organisasi dan mencoba mencari solusinya.

Sistem kinerja manajemen baik secara

individu maupun organisasi seharusnya mempunyai ambisi suatu strategi yang baik melalui proses secara sistematis dan sistemik yang akan mempengaruhi kinerja staf. Sistem kinerja manajemen harus terfokus terhadap perencanaan dan pengembangan kinerja mendatang melalui *restrospective performance appraisal*.

Peran manajemen dalam transparansi organisasi pemerintah adalah mencegah korupsi, memperkuat aturan hukum melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan, kebebasan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (termasuk e-government), menerima kritik dan saran secara baik.

Simpulan :

Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas instansi pemerintah oleh masyarakat cukup tinggi. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik, pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kemampuan manajerial bagi manajemen instansi pemerintah merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung.

Saran :

- a. Harus ada komitmen dari manajemen dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan keuangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan SAI dan akuntabel
- b. Harus merupakan suatu sistem kinerja yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan dan tujuan pemerintah, dan memberikan hak dan kewajiban yang jelas kepada pelaksana teknis.
- c. Manajemen harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan instansi pemerintah.
- d. Manajemen atasan pelaksana teknis harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
- e. Manajemen harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator bagi perubahan manajemen

Daftar Pustaka :

Bultek PSAP 01 , PSAP 04, Ikatan Akuntan Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Deputy Bidang Akuntabilitas Aparatur, 2005, Modul Pelatihan , "Pengantar dan Perencanaan Evaluasi LAKIP", Tim Studi Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Jakarta.

Mardiasmo, " Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik ", Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 No.1, Mei 2006

Nasution, Anwar, 2009," Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara Periode 2004-2009 ", Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Winarno, Budi, 2004, Implementasi konsep " Reinventing Government" dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah seminar, Surabaya